BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Linda, (2023), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Sungai Turak)". Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih kurang baik, terutama pada aspek kejelasan standar, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, finansial, norma, pola hubungan, kondisi sosial, serta pemahaman pelaksana. Adapun aspek yang cukup baik meliputi komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kondisi ekonomi dan politik, struktur birokrasi, tanggapan pelaksana, dan tingkat komitmen. Faktor penghambat yang ditemukan adalah masih adanya pedagang di bahu jalan, sarana prasarana

yang kurang memadai,serta minimnya petugas lapangan. Faktor pendukung meliputi adanya komunikasi dan koordinasi antarinstansi, peran struktur birokrasi, dan kondisi ekonomi pasar yang tidak stabil.

2. Rina Yanti (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)". Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih kurang baik, terutama pada aspek kejelasan standar, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, pola hubungan, kondisi sosial, dan tingkat komitmen. Aspek yang cukup baik meliputi norma dan kondisi ekonomi, sedangkan aspek yang sudah baik adalah komunikasi, koordinasi antarinstansi, struktur birokrasi, kondisi politik, tanggapan, serta pemahaman pelaksana. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu minimnya sosialisasi kepada pedagang, pelaksana yang kurang maksimal, dan fasilitas yang belum memadai.

Faktor pendukungnya adalah adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Parsons (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:15) secara singkat, kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (overarching) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:15) mendefinisikan kebijakan sebagai 'suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau dipilih oleh sebuah partai politik, bisnis, dan lain-lain. Dalam konteks yang lain, kebijakan juga dapat diartikan sebagai kontrak asuransi tertulis.

Adapun menurut Charles O. Jones (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:15) kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal dan *grand design.*

Menurut Ealau dan Prewitt (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:16) mengungkapkan pengertian kebijakan sebagai ‘ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan terulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun pihak yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu)’.

Adapun Hogwood dan Gunn (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:18) memberikan sepuluh pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

a) Merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (as a label for a field activity);
b) Pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*);
c) Usulan-usulan khusus (*as specific proposals*);
d) Keputusan pemerintah (*as decision of government*);
e) Bentuk pengesahan formal (*a formal authorization*);
f) Program (*as programme*);
g) Keluaran (*as output*);
h) Hasil akhir (*as outcome*);
i) Suatu teori atau model (*as a theory or model*)
j) Proses (*as proceses*)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang telah direncanakan untuk memecahkan suatu masalah baik dalam lingkup publik maupun pribadi dan berlaku untuk publik atau masyarakat serta termasuk pihak yang membuatnya.

b. Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Uddin dan Sobirin (2017:35), beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1) Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*);

2) Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3) Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;
4) Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

Menurut Nurcholis (Arenawati, 2016:120), kebijakan publik memiliki ciri sebagai berikut:

a. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat.
b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
c. Kebijakan harus dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

c. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik

Tugas kebijakan publik pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang muncul di tengah masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Nugroho (2017:11), kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka menjawab persoalan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik bertugas mencari solusi agar persoalan sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan dapat diatasi, sekaligus menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas agar kehidupan bersama lebih tertata, adil, dan menyejahterakan.

Fungsi kebijakan publik ialah sebagai alat yang digunakan pemerintah dalam mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.

Subarsono (2016:23), kebijakan publik berfungsi sebagai sarana regulatif, distributif, maupun protektif untuk menjaga keteraturan sosial. Fungsi ini mencakup pengaturan, pengendalian, pengarahan, perlindungan hak-hak warga, serta distribusi sumber daya atau

pelayanan publik secara adil. Dengan fungsi tersebut, kebijakan publik hadir sebagai pedoman penting dalam menciptakan ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulannya, kebijakan publik adalah sarana penting bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat serta mengarahkan kehidupan bersama agar lebih tertib, adil, dan sejahtera. Dengan tugasnya sebagai pemecah masalah dan fungsinya untuk mengatur, mengendalikan, melindungi, serta mendistribusikan sumber daya secara adil, kebijakan publik menjadi pedoman utama dalam mewujudkan keteraturan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Proses Kebijakan Publik

James Anderson (Subarsono, 2021:12) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebgai berikut:

1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
2) Formulasi kebijakan (policy *formulation*)
3) Penentuan kebijakan (*adoption*)
4) Implementasi (*implementation*)
5) Evaluasi (evaluation)

Sedangkan menurut Michael Howlet dan M. Ramesh (Subarsono, 2021:13-14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatan dari pemerintah.
2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu.
4) Implemetasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

e. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Rahayu Kusuma Dewi (2016:26) "pembuatan kebijakan publik terdiri atas serangkaian tahapan. Secara umum, rangkaian tahap ini bersifat linear, tetapi dalam kenyataannya, rangkaian tersebut justru sebaliknya, yakni non-linear dan literatif. Ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut".

Menurut Rahayu Kusuma Dewi (2016:26-30) proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut:

1) Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tahapan ini berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya, isu-isu tersebut merupakan konidisi yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini kondisi berkembang menjadi masalah pada saat munculnya kesadaran atau kebutuhan masyarakat untuk mengubah kondisi itu melalui tindakan-tindakan pemerintah. Kesadaran dan kebutuhan yang demikian itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya, menunjukkan bahwa masalah kebijakan dapat diidentifikasi melalui penggunaan suatu indikator, munculnya persitiwa-peristiwa tertentu atau umpan balik suatu program. Tahap ini dapat melibatkan sejumlah besar partisipan, baik individu, kelompok, maupun institusi.

2) Tahap penentuan agenda (agenda setting)

Tahap ini berkaitan dengan penentuan masalah-masalah yang diutamakan atau diprioritaskan. Penentuan agenda merupakan tahap penting karena berkaitan dengan proses dan politik perumusan masalah. Pada tahap ini cara suatu masalah yang dirumuskan akan memengaruhi *spectrum alternative*

pemecahanya, yang akan memengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

3) Perumusan alternatif kebijakan (policy formulation)

Tahap ini melibatkan kelompok yang disebut "komunitas kebijakan", yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendikia dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda dan perumus alternatif, seperti *subgoverment*, *iron triangle*, dan *issue network*

4) Pemilihan alternatif kebijakan (policy adoption)

Tahap ini berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternatif yang tersedia dan berkenaan pulaAno dengan legitimasi dari alternatif yang dipilih, suatu rancangan tindakan-tindakan ditetapkan menjadi peraturan.

5) Pelaksanaan kebijakan (policy implementation)

Tahap ini berkaitan dengan upaya mencapai tujuan tertentu. Pada dasarmya tahap ini berhubungan dengan cara kerja pemerintah. Karena makna dan sifat implementasi dapat dipahami dari berbagai dimensi, tahap ini menunjukan signifikansinya. Dalam hal ini juga pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, kenyataannya proses yang terlibat sederhana itu justru tampak rumit. Hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana keadaan ini terjadi sebagai upaya untuk menghindarkan konflik atau menggariskan kebijakan dalam rumusan-rumusan yang umum.

6) Tahap penilaian kebijakan (policy evaluation)

Tahap ini berhubungan dengan pembahasan implementasi kebijakan. Fokus tahap ini adalah identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Secara teoritis, evaluasi kebijakan menyediakan umpan balik bagi penentuan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat bersifat formatif atau summatif. Penilaian formatif berkenaan dengan seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan, sedangkan penilaian summatif berkaitan dengan hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Konsep implemantasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *to implement* yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Leo Agustino (2020:126) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai "proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan".

Mazmanian & Sabatier (Leo Agustino, 2020:128) mendifinisikan implemetasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

A. Mazmanian dan P.A Sabatier (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:154) mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksakannya.

Joko Widodo (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:154) menyatakan bahwa ' implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebalumnya oleh pembuat kebijakan'.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (Deddy Mulyadi, 2016:57) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangkat melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan hasil dari suatu kebijakan (segala peraturan pemerintah pusat atau daerah, menteri ataupun dalam bentuk program dan undang-undnag) yang telah dirancang sedemikian rupa yang memilii tujuan sehingga dalam penerapannya sudah dirancang alat apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Subarsono (2021:89) "keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebu saling berhubungan satu sama lain'.

Berikut perbandingan teori yang saya gunakan dengan dengan teori yang lain:

1) Teori George C. Edwards III (Agustino, 2020:154)

   Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implemtasi kebijakan menurut pandangan George C. Edawrds III (subarsono), 2021:29) meliputi empat variabel yaitu:

   a) Komunikasi, keberhasilan impementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
   b) Sumber daya, agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya dalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c) Disposisi adlah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan degan biak seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur birokrasi, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalanya adanya prosedur operasi uang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi stiap implementor dalam bertindak.

2) Teori Donald S. Van Mater dan Carl E Van Horn (Subarsono, 2021:99)

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2021:99) menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:

a) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jela dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

b) Sumberdaya. Dalam sutu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources)* maupun sumber daya materi (*material resource)* dan sumberdaya metode *(method resource).* Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c) Hubungan anatara organisasi. Dalam banyak program implemantasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi, untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi

keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya

d) Karakteristik agen pelaksana. Dalam sutu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e) Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu:
   (1) Respons implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;
   (2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;
   (3) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung dan menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

3) Teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2021:93)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2021:93) menurut pandangannya terdapat dua variabel yaitu:

a) Isi kebijakan, yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut, ketepatan letak sebuah program, pelaksanaan kebijakan dan sumberdaya yang memadai.

b) Lingkungan kebijakan mencakup kekuasan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam

implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III karena dianggap paling sederhana, operasional, dan relevan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teori ini hanya memuat empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun keempatnya sudah mencakup aspek penting yang memengaruhi implementasi di lapangan. Dibandingkan dengan teori Van Meter & Van Horn yang cenderung kompleks dengan enam variabel serta teori Grindle yang lebih menekankan pada konteks politik dan kepentingan aktor, teori Edward III lebih aplikatif digunakan pada penelitian ini karena dapat menjelaskan masalah utama seperti lemahnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, rendahnya kepatuhan pedagang, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

3. Pengelolaan pasar

a. Pengertian Pengelolaan pasar

Pengelolaan pasar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan aktivitas pasar agar dapat berjalan secara tertib, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurut Yulianto (2017:45), pengelolaan pasar tidak hanya mencakup penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pengaturan operasional, penataan

pedagang, serta pelayanan kepada konsumen. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan pasar menjadi salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

b. Tujuan Pengelolaan Pasar

Tujuan utama dari pengelolaan pasar adalah menciptakan pasar yang tertata, aman, dan bersih, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan pembeli maupun pedagang.

Menurut Suparlan (2016:88), pengelolaan pasar juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan pedagang, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat peran pasar tradisional dalam menghadapi kompetisi dengan pasar modern.

c. Aspek-Aspek Pengelolaan Pasar

Pengelolaan pasar setidaknya mencakup beberapa aspek penting yaitu:

a. Aspek kelembagaan, yakni pengaturan kelembagaan pengelola pasar yang jelas, apakah dikelola oleh pemerintah daerah, BUMD, atau kerja sama dengan pihak ketiga.
b. Aspek sarana dan prasarana, yaitu ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti kios, los, tempat parkir, toilet, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
c. Aspek ketertiban dan kebersihan, yaitu pengaturan jam operasional, penataan pedagang, pengawasan retribusi, serta penegakan peraturan daerah.

d. Aspek pelayanan, yaitu bagaimana pengelola pasar memberikan pelayanan kepada pedagang maupun pembeli, termasuk transparansi dalam pengelolaan retribusi.

d. Pengelolaann Pasar sebagai Bagian dari Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan pasar merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Nurcholis (2018:122), pengelolaan pasar bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, menjaga stabilitas harga, serta menyediakan ruang interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pasar menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian atau pernyataan tentang konsep pemecahan masalah dimana kerangka pemikiran tersebut dibuat oleh peneliti yang didalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel.

Agar penelitian tidak melebur dari pembahasan maka dibuat krangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian ini. Pengukuran implemtasi yang peneliti gunakan adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana informasi terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pedagang maupun aparat pelaksana, serta adanya sosialisasi yang memadai.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan petugas, fasilitas pendukung, serta anggaran yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah komitmen, konsistensi, dan sikap aparat pelaksana dalam menegakkan aturan, serta sejauh mana kepatuhan pedagang terhadap kebijakan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah kejelasan mekanisme kerja, SOP (Standar Operasional Prosedur), serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, termasuk dalam hal penegakan sanksi terhadap pelanggar.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

